

PANDUAN PELAKSANAAN

**Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh
Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan
Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia**



Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2022

**PANDUAN PELAKSANAAN
PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA
MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA TANGGUH
DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN JANGKA PANJANG (PJP)
BAGI LANSIA**

**DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2022**

KATA SAMBUTAN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melaksanakan fungsi pembangunan keluarga melalui pendekatan siklus hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan harapan agar keluarga dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga secara optimal. Kedelapan fungsi keluarga tersebut meliputi fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Penerapan 8 fungsi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Perubahan struktur penduduk Indonesia mendorong terjadinya proses penuaan yang tercermin dari meningkatnya jumlah dan proporsi lanjut usia (lansia). Pertumbuhan lansia yang pesat merupakan efek dari terjadinya transisi demografi. Pada tahun 2021, proporsi lansia mencapai 10,82 persen atau sekitar 29,3 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Indonesia yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk. Akan tetapi, peningkatan kuantitas tersebut belum sebanding dengan kualitasnya. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, terdapat delapan provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase penduduk lansia yang sudah diatas 10 persen. Delapan provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (15,52 persen), Jawa Timur (14,53 persen), Jawa Tengah (14,17 persen), Sulawesi Utara (12,74 persen), Bali (12,71 persen), Sulawesi Selatan (11,24 persen), Lampung (10,22 persen), dan Jawa Barat (10,18 persen).

Salah satu isu strategis dalam bidang pembangunan keluarga adalah masih rendahnya kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia. Oleh karena itu, lansia termasuk salah satu kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Berbagai sektor baik dari kalangan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan upaya untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi lansia. BKKBN termasuk salah satu lembaga pemerintah yang turut serta melaksanakan program Pembangunan Keluarga Lansia dan Rentan. Tujuannya adalah mewujudkan lansia tangguh yang produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat.

BKKBN mendukung salah satu agenda pembangunan (prioritas nasional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu Meningkatkan

Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Dukungan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) “Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia”. Keluaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) pada 34 provinsi sasaran Pro PN.

Pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan merupakan bagian dari Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terutama pada Sub Urusan Keluarga Sejahtera yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib tapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek ini, kami harapkan terdapat sinergitas antara BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta mitra kerja terkait di daerah.

Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Pro PN “Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia”. Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pro PN di tingkat wilayah. Semoga kegiatan yang kita upayakan bersama ini ke depannya dapat meningkatkan kualitas hidup lansia serta peran keluarga lansia demi mewujudkan lansia tangguh di Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2022

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga,



Nopian Andusti, S.E., M.T.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan buku “Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia Tahun 2022” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pengelola program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menjadi lokus kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Tahun 2022.

Sasaran wilayah/lokus pelaksanaan kegiatan Pro PN diarahkan pada Kelompok BKL yang berada pada 34 provinsi. Pada tahun ini, jumlah kelompok kegiatan (poktan) BKL yang menjadi target sasaran Pro PN sebanyak 10.214 kelompok. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah jumlah Poktan BKL yang melaksanakan kegiatan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang serta melaporkan K/O/BKL dan R/I/BKL pada Sistem Informasi Keluarga (New SIGA).

Keberadaan panduan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pro PN di tingkat wilayah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dengan adanya kritik, masukan, dan saran yang bermanfaat untuk menyempurnakan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2022
Direktur Bina Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan,



Erisman, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
LATAR BELAKANG	7
TUJUAN	10
OUTPUT DAN INDIKATOR	11
SASARAN	12
ROADMAP DAN RUANG LINGKUP	13
KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
PELAKSANAAN	16
PENCATATAN DAN PELAPORAN	30
PENGANGGARAN	35
MONITORING DAN EVALUASI	37
PENUTUP	39

LATAR BELAKANG

Saat ini, Indonesia sudah berada pada tahapan angka kematian dan kelahiran yang rendah (Bappenas, 2019) dan struktur penduduk Indonesia saat ini sudah berada pada *ageing population*, ditandai dengan persentase penduduk lansia tahun 2020 yang mencapai lebih dari 10 persen. Pada tahun 2021, proporsi lansia mencapai 10,82 persen atau sekitar 29,3 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Indonesia yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (Kemenkes, 2017). Perubahan struktur penduduk Indonesia mendorong terjadinya proses penuaan yang tercermin dari meningkatnya jumlah dan proporsi lanjut usia (lansia). Pertumbuhan lansia yang pesat merupakan efek dari terjadinya transisi demografi. Menurunnya angka kelahiran sebagai dampak keberhasilan program keluarga berencana. Penurunan tingkat kelahiran atau semakin panjangnya usia harapan hidup disebabkan oleh peningkatan nutrisi, semakin baiknya sanitasi, kondisi ekonomi semakin baik serta fasilitas kesehatan yang semakin memadai.

Peningkatan jumlah lansia ini memiliki dampak secara sosial dan ekonomi, baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Permasalahan yang cukup besar di kalangan lansia adalah kestabilan finansial lansia, dimana lansia kebanyakan tidak memiliki kestabilan finansial. Tidak banyak lansia yang memiliki pensiun maupun yang telah mempersiapkan jaminan finansial secara matang di usia tuanya, sehingga lansia akan tergantung secara ekonomi kepada anaknya atau yang lebih muda. Hal ini akan menjadi beban bagi usia produktif, dimana selain menanggung finansial dirinya sendiri, keluarga inti dan ditambah dengan lansia. Selain itu permasalahan kesehatan juga menjadi sangat penting bagi lansia, dimana transisi epidemiologi dari penyakit menular berubah menjadi penyakit degeneratif. Dengan semakin banyaknya jumlah lansia, maka semakin besar juga fasilitas kesehatan yang harus disiapkan untuk menanggulangi penyakit degeneratif yang diderita oleh lansia. Permasalahan kesehatan ini juga tidak hanya berdampak bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas.

Pandemi Covid – 19 yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lansia. WHO menyatakan bahwa lansia merupakan kelompok usia yang paling rentan terpapar Covid – 19. Kerentanan pada lansia terjadi karena melemahnya fungsi imun serta adanya penyakit degeneratif, seperti: jantung, hipertensi dan diabetes (LIPI, 2020). Pada kondisi ini lansia sangat membutuhkan perlindungan, akses terhadap makanan bergizi, ketersediaan kebutuhan dasar, obat – obatan serta perawatan sosial. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam situasi pandemi covid ini, dimana keluarga yang tinggal

bersama lansia harus melakukan perlindungan kepada lansia dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga lansia agar tidak terpapar covid. Bagi keluarga yang jauh juga harus rutin melakukan pemantauan dan pemenuhan kebutuhan lansia sehari-hari.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada lansia selain masalah kesehatan dan ekonomi adalah kesepian, dimana lansia merasa tersisihkan, terpencil dari orang lain dan merasa berbeda dari orang lain. Lansia yang pada masa mudanya selalu dimintai pendapat, nasehat dan dianggap lebih berpengalaman seiring dengan bertambahnya usia dan kemajuan teknologi sudah tidak menjadi tempat berbagi, meminta nasehat maupun tempat bertanya. Kondisi inilah yang menimbulkan perasaan tidak dihargai, sudah dilupakan dan merasa bahwa dirinya berbeda dan menjadi beban bagi orang lain. Untuk melawan rasa kesepian itu dibutuhkan dukungan sosial, yaitu kebutuhan agar lansia bisa terhubung dengan orang lain, memiliki kedekatan dengan orang lain dan kebersamaan di dalam kelompok. Disinilah peran keluarga sangat penting, dukungan keluarga inti atau pasangan sangatlah penting dibandingkan dukungan dari orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Adanya dukungan dan pendampingan oleh keluarga juga akan menurunkan risiko penyakit dan kematian pada lansia. Berdasarkan data Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2021, 29,52% rumah tangga dihuni oleh lansia. Artinya ada 1 diantara 4 rumah tangga yang anggotanya lansia. Hal ini berarti faktor budaya dan agama yang ada di Indonesia sangat berpengaruh, dimana tanggungjawab anak untuk berbakti kepada orang tuanya menyebabkan masih banyaknya jumlah lansia yang tinggal bersama keluarga (pasangan, anak bahkan sampai 3 generasi). Tinggal bersama keluarga lebih bisa meningkatkan kualitas hidup lansia, mengingat keluarga dapat memberikan perawatan kesehatan yang optimal, menjamin pemenuhan kebutuhan, menjaga dan memberikan dukungan kepada lansia. Dengan dukungan keluarga, lansia akan merasa bahagia dan secara psikologis akan meningkatkan kesehatan lansia. Selain itu jumlah lansia yang mengalami disabilitas sebanyak 12,40% yang harus menjadi perhatian kita semua karena otomatis lansia yang disabilitas ini membutuhkan perlakuan khusus atau perawatan jangka panjang baik yang dilakukan oleh keluarga maupun panti².

Permasalahan tersebut menjadi isu kelanjutusiaan yang harus mulai dipersiapkan dan diantisipasi kemungkinan permasalahan yang akan muncul seiring semakin menuanya penduduk di Indonesia, maka diperlukan program yang mendukung terwujudnya lansia yang sehat, aktif, produktif dan bermartabat. Program pemerintah melalui Prioritas Nasional yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan Program Prioritas penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan Kegiatan Prioritasnya adalah kesejahteraan sosial, dengan proyek prioritasnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif, produktif) dan pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang (PJP) berbasis komunitas yang terintegrasi. Untuk itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program pembinaan ketahanan keluarga lansia, untuk mendukung proyek prioritas tersebut dalam bentuk kegiatan proyek prioritas nasional (Pro PN) penguatan pelayanan ramah lansia untuk menciptakan lansia yang tangguh melalui 7 dimensi lansia tangguh serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi Lansia yang membutuhkan

perawatan jangka panjang (PJP) di BKL. Lokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok BKL yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat optimal, perlu disusun Panduan Pelaksanaan yang akan menjadi acuan bagi Pengelola dan Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia di berbagai tingkatan.

TUJUAN

UMUM

Melakukan penguatan pelayanan ramah lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).

KHUSUS

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lansia dalam penerapan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dalam pendampingan kepada lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam melakukan pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia;
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja strategis di Kabupaten/Kota tentang penguatan pelayanan ramah Lansia;
5. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program kelanjutusiaan antar instansi terkait; dan
6. Meningkatkan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (Poktan BKL) melalui pelaksanaan sekolah lansia.

OUTPUT DAN INDIKATOR

Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia. Berikut merupakan target *output* jumlah kelompok BKL yang menjadi sasaran Proyek Prioritas Nasional (angka bersifat non kumulatif).

TARGET TAHUN				
2020	2021	2022	2023	2024
9.984 kelompok	10.215 kelompok	10.214 kelompok	10.214 kelompok	10.214 kelompok

Indikator dari output ini adalah Jumlah Bina Keluarga Lansia Yang Melaksanakan 7 Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang yang dilaporkan melalui R/I/BKL di Sistem Informasi Keluarga (New SIGA).

SASARAN

Sasaran Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi lansia melalui BKL terdiri dari sasaran wilayah (lokus) dan sasaran pengguna dalam jangka waktu 2020 - 2024.

SASARAN WILAYAH/LOKUS

34 Provinsi

514 Kabupaten/Kota

50.841 PoktanBKL



SASARAN PENGGUNA

1. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Provinsi, yaitu:
 - Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Pusat;
 - Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi;
2. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kabupaten dan Kota, yaitu OPD Pengendalian Penduduk dan KB kab/kota;
3. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kecamatan, yaitu Penyuluh KB/ Penyuluh Lapangan KB;
4. Pengelola Poktan BKL, terdiri dari:
 - Pengurus kelompok BKL
 - Kader BKL
 - Kader PKK
 - Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat

ROADMAP DAN RUANG LINGKUP

Triwulan 1 Januari - Maret	Triwulan 2 April - Juni	Triwulan 3 Juli - September	Triwulan 4 Oktober - Desember
Indikator dan Target:			
- Registrasi seluruh kelompok BKL sasaran Pro PN melalui K/O BKL di aplikasi New SIGA. - Pengisian laporan R/1/BKL di aplikasi New SIGA. - Seluruh Kader BKL sasaran Pro PN memahami dan bisa menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - Persiapan pembentukan sekolah lansia.	- 25% persen kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - 25% kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan pelaporan bulanan melalui R/1/BKL di aplikasi New SIGA. - Pembentukan sekolah lansia di 10 provinsi (Sumut, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, NTT, dan NTB) dan mengacu pada pedoman pembentukan sekolah lansia.	- 60% kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - 60% persen kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan pelaporan bulanan melalui R/1/BKL di aplikasi New SIGA. - Pelaksanaan sekolah lansia di 10 provinsi (Sumut, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, NTT, dan NTB) dan mengacu pada pedoman pembentukan sekolah lansia.	- 100% kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - 100% kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan pelaporan bulanan melalui R/1/BKL di aplikasi New SIGA. - Pelaksanaan sekolah lansia di 10 provinsi (Sumut, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, NTT, dan NTB) dan mengacu pada pedoman pembentukan sekolah lansia.
Keluaran:			
- Tersedianya dokumen rencana kerja, materi dan media KIE kelanjutusiaan di	- Terlaksananya kegiatan penyuluhan di kelompok BKL - Tersedianya pelaporan	- Terlaksananya kegiatan penyuluhan di kelompok BKL - Tersedianya pelaporan	- Terlaksananya kegiatan penyuluhan di kelompok BKL - Tersedianya pelaporan

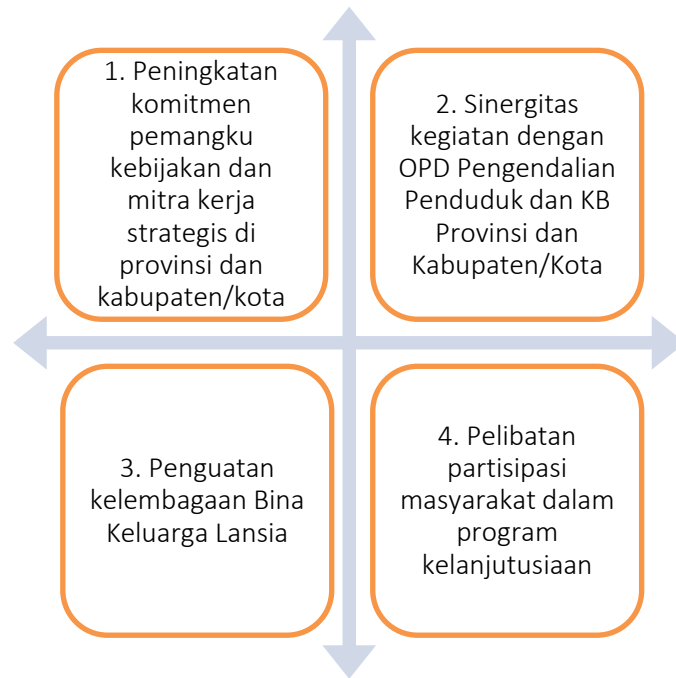
Triwulan 1 Januari - Maret	Triwulan 2 April - Juni	Triwulan 3 Juli - September	Triwulan 4 Oktober - Desember
seluruh kelompok BKL Sasaran Pro PN. - Terlaksananya orientasi/pelatihan kader BKL sasaran Pro PN tentang 7 dimensi lansia tangguh. - Terlaksananya sosialisasi/pelatihan kader BKL sasaran Pro PN tentang pendampingan PJP. bagi lansia - Kelompok BKL melaporkan K/O/BKL di New SIGA. - Kelompok BKL melaporkan R/1/BKL di New SIGA. - Tersusunnya kurikulum, materi, dan rencana kegiatan sekolah lansia.	kegiatan bulanan BKL sasaran Pro PN melalui R/1/BKL - Terbentuknya sekolah lansia di 10 provinsi	kegiatan bulanan BKL sasaran Pro PN melalui R/1/BKL - Terlaksananya sekolah lansia di 10 provinsi	kegiatan bulanan BKL sasaran Pro PN melalui R/1/BKL - Terlaksananya sekolah lansia di 10 provinsi

RUANG LINGKUP:

1. Pengembangan dan perbanyak materi dan media kelanjutusiaan;
2. Sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh;
3. Orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
4. Pertemuan integrasi pendampingan perawatan jangka panjang bersama mitra;
5. Pembentukan dan pelaksanaan sekolah lansia di Kelompok BKL; dan
6. Sinkronisasi kegiatan kelanjutusiaan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KEBIJAKAN



STRATEGI

1. Meningkatkan Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh kepada pemangku kebijakan dan mitra kerja strategis;
2. Memperkuat kapasitas Pengelola BKL melalui Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kabupaten/kota;
3. Mempersiapkan dan mengembangkan modul dan media kelanjutusiaan;
4. Meningkatkan pertemuan integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang;
5. Meningkatkan evaluasi data tentang Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kelompok BKL;
6. Menyediakan laporan perkembangan kegiatan Penguatan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kelompok BKL;
7. Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam pembentukan sekolah lansia; dan
8. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pro PN di tengah situasi pandemi Covid-19.

PELAKSANAAN

PUSAT

Pelaksana di tingkat pusat adalah :

1. Pelaksana utama di pusat adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;
 - b. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selaku Pelaksana.
2. Dalam pelaksanaannya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/ Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Organisasi Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Kementerian/Lembaga di pusat;
 - b. Kantor Staf Presiden (KSP);
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
 - d. Kementerian Kesehatan RI;
 - e. Kementerian Keuangan RI;
 - f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Kementerian Dalam Negeri;
 - h. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal;
 - i. Kementerian Sosial RI; dan
 - j. Organisasi Masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain yang ada di pusat.

Tugas pelaksana di tingkat pusat antara lain :

1. Menyiapkan Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia;
2. Menyiapkan materi dan media kelanjutusiaan;
3. Melaksanakan pengembangan sekolah lansia bersama mitra;
4. Melaksanakan Sosialisasi Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia kepada provinsi;
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka

- Panjang (PJP) bagi Lansia;
6. Menyusun laporan pelaksanaan penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia;
 7. Strategi pelaksanaan di masa pandemi Covid-19:
 - a. Menyusun materi dalam bentuk *e-book* atau *softfile* yang bisa di *download* melalui aplikasi atau melalui grup media sosial (whatsapp group, telegram group, dll);
 - b. Melakukan sosialisasi melalui virtual meeting maupun *hybrid* (daring dan luring);
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin setiap bulan melalui *virtual meeting* dan surat formal.

PROVINSI

Pelaksana di tingkat provinsi adalah :

1. Pelaksana Utama di provinsi adalah Perwakilan BKKBN Provinsi:
 - a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;
 - b. Kepala Sub Bidang Bina Keluarga Balita Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia selaku Pelaksana.
2. Dalam pelaksanaannya Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Dinas/Lembaga di provinsi yang terdiri dari:
 - BAPPEDA;
 - Dinas yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Desa dan Daerah Tertinggal;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Perguruan Tinggi
 - c. Organisasi Masyarakat/Non Pemerintah, PKK, Organisasi Profesi dll yang ada di provinsi.

Tugas pelaksana di tingkat provinsi antara lain :

1. Melakukan pemetaan kelompok BKL yang menjadi target sasaran Pro PN. Pemetaan kelompok sasaran ini diharapkan dapat mengutamakan kelompok BKL

yang memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kelompok BKL yang aktif melaksanakan penyuluhan dan kegiatan BKL lainnya;
- b. Kelompok yang sudah melakukan registrasi ke dalam K/O/BKL Sistem Informasi Keluarga (SIGA), atau apabila belum segera melakukan registrasi di aplikasi New SIGA;
- c. Kelompok BKL yang sudah memiliki sumber penganggaran operasional kelompok yang bisa berasal dari pilihan di bawah ini:
 - Kelompok BKL yang ada di Kampung KB, ada pembiayaan dari dana BOKB, atau;
 - Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD, atau;
 - Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari Anggaran Dana Desa (ADD), atau;
 - Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari, kemitraan, dan lain sebagainya.

2. Melakukan Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutusiaan

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
Sasaran	✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota; ✓ Mitra Kerja Kabupaten/Kota; ✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.
Bentuk kegiatan	1. Perbanyak materi dan media 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang, yang terdiri dari: a. buku pegangan kader tujuh dimensi lansia tangguh; b. pedoman pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; c. video pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; d. video 7 dimensi lansia tangguh, bagi kelompok BKL yang bisa memutar video (memiliki alat pemutaran video) e. Buku pendukung lainnya apabila masih memiliki ketersediaan anggaran. 2. Apabila diperlukan maka bisa melakukan pengembangan materi 7 dimensi lansia

	tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia sesuai dengan kearifan lokal bekerjasama dengan mitra kerja. 3. Perbanyak buku bisa dalam bentuk <i>softfile</i> atau <i>e-book</i>, khusus diberikan kepada kelompok BKL yang memiliki sarana untuk mengakses dan menggunakan internet.
Hasil yang diharapkan	✓ Tersedianya materi 7 dimensi lansia tangguh; ✓ Tersedianya materi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; ✓ Tersosialisasikannya materi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.

3. Melaksanakan Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader BKL tentang penerapan tujuh dimensi lansia tangguh.
Sasaran	✓ Kader BKL kelompok sasaran Pro PN (Wajib); ✓ Pengelola kelompok BKL sasaran Pro PN; ✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.
Bentuk kegiatan	1. Pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan bisa berupa: • kegiatan pertemuan di lapangan atau kegiatan <i>full day meeting</i> bagi kader BKL yang bisa melakukan tatap muka langsung; • kegiatan daring/<i>e-learning</i> bagi kader BKL yang masih belum bisa melaksanakan sosialisasi secara tatap muka langsung. 2. Narasumber dapat berasal dari profesional, widyaiswara, maupun pengelola program ketahanan keluarga lansia dan rentan.
Hasil yang diharapkan	1. Tersosialisasikannya 7 dimensi lansia tangguh kepada kader dan anggota kelompok BKL. 2. Tersedianya pencatatan dan pelaporan BKL

melalui aplikasi New SIGA.

4. Melaksanakan Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader BKL tentang pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
Sasaran	✓ Kader BKL kelompok sasaran Pro PN (Wajib); ✓ Pengelola kelompok BKL sasaran Pro PN; ✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.
Bentuk kegiatan	1. Orientasi yang dilaksanakan bisa berupa • kegiatan pertemuan di lapangan atau kegiatan <i>full day meeting</i> bagi kader BKL yang bisa melakukan tatap muka langsung; • Kegiatan daring/<i>e-learning</i> bagi kader kelompok BKL yang masih belum bisa melaksanakan sosialisasi secara tatap muka langsung. 2. Narasumber dapat berasal dari profesional, dinas kesehatan, dinas sosial dan pengelola program ketahanan keluarga lansia dan rentan.
Hasil yang diharapkan	1. Tersosialisasikannya materi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. 2. Terlaksananya pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui : • Identifikasi kemandirian lansia melalui instrumen <i>Activity Daily Living</i> (ADL); • Terlaksananya pendampingan jangka panjang bagi lansia oleh keluarga anggota BKL yang memiliki lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang; • Melakukan pendampingan kepada lansia yang membutuhkan PJP yang tidak

	memiliki keluarga dan dirujuk kepada instansi atau mitra kerja terkait.
--	---

5. Melaksanakan Pertemuan Integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bersama Mitra

Tujuan	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pendampingan perawatan jangka panjang antar instansi terkait.
Sasaran	✓ Perwakilan BKKBN Provinsi; ✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/ Kota; ✓ OPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten dan Kota; ✓ OPD Sosial Provinsi/Kabupaten dan Kota.
Bentuk kegiatan	1. Kegiatan integrasi yang dilaksanakan berupa kegiatan pertemuan rapat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pro PN baik secara tatap muka langsung maupun melalui rapat virtual (daring); 2. Pertemuan dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun.
Hasil yang diharapkan	Terlaksananya pendampingan perawatan jangka panjang di lapangan yang terintegrasi (sinergitas antara puskesmas/posyandu lansia, kelompok kegiatan BKL dan bantuan sosial bagi lansia).

6. Pembentukan Sekolah Lansia

Tujuan	Meningkatkan kualitas kegiatan kelompok BKL dalam mewujudkan Lansia Tangguh melalui Konsep SMART yang mencakup 7 dimensi lansia tangguh (spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional vokasional, dan lingkungan).
Sasaran	✓ Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (Poktan BKL)

	✓ Pra lansia (45-59 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas) anggota Poktan BKL
Bentuk kegiatan	1. Tahap Pembentukan 2. Tahap Persiapan Pelaksanaan 3. Tahap Pelaksanaan Tahapan ini mengacu pada Buku Panduan Sekolah Lansia di Kelompok BKL.
Hasil yang diharapkan	Terbentuk dan terlaksananya sekolah lansia di Kelompok BKL.

7. Sinkronisasi Kegiatan Kelanjutusiaan

Tujuan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan ramah lansia melalui sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL melalui kerja sama dengan lintas sektor.
Sasaran	✓ Pengelola program kelanjutusiaan ✓ Pengelola Poktan BKL ✓ Anggota Poktan BKL ✓ Mitra kerja program kelanjutusiaan
Bentuk kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan momentum dan kegiatan lain yang mendukung program kelanjutusiaan seperti HLUN, HLUIN, Hari Keluarga Nasional, dll. 2. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan bimbingan teknis pelaksanaan Pro PN di berbagai tingkatan. 3. Pelaksanaan kegiatan <i>live event</i> di Aplikasi Golantang.
Hasil yang diharapkan	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan ramah lansia di kelompok BKL dalam rangka meningkatkan kualitas lansia melalui penguatan kerja sama lintas sektor.

8. Strategi pelaksanaan di masa pandemi Covid-19

- a. Memperbanyak materi bagi poktan yang tidak memiliki akses internet dan mensosialisasikan materi dalam bentuk *e-book* atau *softfile* yang bisa diunduh/download atau di share di Group Media Sosial (*whatsapp group, telegram, dll*);
- b. Melaksanakan sosialisasi dan orientasi materi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi kader sasaran Pro PN melalui *Virtual Meeting* atau *e-learning* yang bisa diperkuat melalui pembelajaran mandiri kelas BKL di Aplikasi siBIMA melalui link <https://lingkarbelajar.id/>;
- c. Melaksanakan integrasi kegiatan dengan dinas terkait (Kesehatan dan sosial); dan
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan rutin BKL sasaran Pro PN melalui aplikasi New SIGA, *Virtual Meeting*, Media Sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dll*) atau Media Komunikasi Group (*Whatsapp group, Telegram group, dll*).

KABUPATEN DAN KOTA

Pelaksana di tingkat kabupaten dan kota adalah :

1. Pelaksana Utama di kabupaten/kota adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku pengarah;
 - b. Kepala Sub Bidang yang menangani Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, khususnya mengenai Ketahanan Keluarga Lansia selaku Pelaksana.
2. Dalam pelaksanaannya, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Dinas/Lembaga Pemerintah di kabupaten dan kota terdiri dari:
 - BAPPEDA;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Perguruan Tinggi
 - c. Organisasi sebagai Representasi Masyarakat/Non Pemerintah, PKK, Organisasi Profesi dan lain-lain yang ada di kabupaten/kota.

Tugas pelaksana di tingkat kabupaten dan kota antara lain :

1. Menyediakan Dukungan Operasional Kegiatan BKL

Tujuan	Meningkatnya pengetahuan kader dan anggota kelompok BKL tentang 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui kegiatan penyuluhan rutin bulanan di Lokus Poktan BKL.
Sasaran	Poktan BKL Pro PN
	•
Hasil yang diharapkan	Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP Lansia di BKL.

2. Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan BKL

Tujuan	Memastikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.
Sasaran	Poktan BKL
Bentuk kegiatan	1. Pemantauan melalui aplikasi New SIGA; 2. Pemantauan langsung ke lapangan (perjalanan dinas); 3. Penyusunan Laporan.
Hasil yang diharapkan	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.

3. Strategi Pelaksanaan di masa pandemi Covid-19

- a. Menetapkan kelompok BKL Sasaran Pro PN;
- b. Melakukan pemetaan wilayah mana saja yang bisa dilakukan *virtual meeting* (*e-learning*) dan pertemuan secara langsung;
- c. Mendukung biaya operasional pelaksanaan penyuluhan kelompok BKL baik secara daring maupun luring;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan rutin BKL sasaran Pro PN

melalui aplikasi New SIGA, *Virtual Meeting*, Media Sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*, dll), dan Media Komunikasi Group (*Whatsapp Group, Telegram Group*, dll).

4. Kabupaten/Kota bisa melaksanakan kegiatan seperti yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi dengan anggaran APBD untuk sasaran poktan BKL Pro PN.

KECAMATAN

Pelaksana di tingkat kecamatan adalah :

1. Pelaksana Utama di tingkat kecamatan adalah Pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Bina Keluarga Lansia di Tingkat Kecamatan, yaitu PKB/PLKB;
2. Dalam pelaksanaannya, PKB/PLKB berkoordinasi dengan Dinas/ Lembaga/ Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Dinas/Lembaga pemerintah di kecamatan, terdiri dari:
 - Aparat Kecamatan
 - Puskesmas
 - Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - b. Organisasi sebagai Representasi Masyarakat/Non Pemerintah/ Swasta

Tugas pelaksana di tingkat kecamatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan bimbingan kepada kelompok kegiatan dalam rangka Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL sasaran Pro PN

Tujuan	Terlaksananya kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.
Sasaran	Poktan BKL
Bentuk kegiatan	Pembimbingan pengelola dan kader BKL baik secara tatap muka langsung maupun secara daring (virtual meeting, group whatsapp, group telegram, dll)

Hasil yang diharapkan	Terbinanya Pengelola dan kader BKL dalam melaksanakan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.
-----------------------	--

2. Melaksanakan pelaporan Kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL

Tujuan	Meningkatnya pemantauan pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL melalui pelaporan terkini
Sasaran	Poktan BKL
Bentuk Kegiatan	• Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL melalui K/O/BKL dan R/I/BKL di Sistem Informasi Keluarga (New SIGA); • Melakukan pendampingan pelaporan poktan BKL bagi kelompok BKL yang bisa melakukan pelaporan secara langsung (<i>online</i>) di aplikasi New SIGA.
Hasil yang diharapkan	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL di SIGA.

3. Strategi Pelaksanaan di masa pandemi Covid-19
 1. Melakukan pelaporan K/O dan R/1 kelompok BKL sasaran Pro PN;
 2. Melakukan pembinaan pelaksanaan Pro PN kepada pengurus dan kader kelompok kegiatan baik secara *Virtual meeting*, melalui Media Sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, dll*), atau Media Komunikasi Group (*Whatsapp Group, Telegram Group, dll*);
 3. Melakukan pemetaan kelompok BKL yang bisa melakukan pertemuan secara

virtual, melalui media sosial, media komunikasi group dan kelompok yang melaksanakan pertemuan luring.

KELOMPOK KEGIATAN

Pelaksana di kelompok kegiatan adalah :

1. Pelaksana Utama di tingkat kelompok kegiatan adalah Pengelola Bina Keluarga Lansia;
2. Dalam pelaksanaannya, Pengelola BKL berkoordinasi dengan:
 - Aparat Desa
 - Tokoh Agama
 - Tokoh Adat
 - Tokoh Masyarakat
 - Kader Posyandu Lansia
 - Pendamping Desa
 - Pekerja Sosial
 - Kader lainnya

Tugas pelaksana di kelompok kegiatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan rutin BKL (penyuluhan, pendampingan, pengembangan, dll) mengenai Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di kelompok BKL.

Tujuan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia.
Sasaran	✓ Keluarga yang memiliki Lansia; ✓ Lansia.
Bentuk kegiatan	Komunikasi kelompok (penyuluhan), dan/atau Komunikasi interpersonal/pribadi melalui : • Bagi kelompok BKL yang bisa melaksanakan pertemuan melakukan penyuluhan tatap muka langsung dengan melaksanakan protokol kesehatan • Bagi kelompok BKL yang tidak bisa melaksanakan pertemuan secara langsung bisa melakukan penyuluhan melalui daring (virtual meeting, group whatsapp, group telegram, dll).

Hasil yang diharapkan	1. Tersampainya materi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh kepada anggota kelompok BKL; 2. Tersampainya materi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia kepada anggota kelompok BKL; 3. Adanya dokumen identifikasi kemandirian lansia melalui instrumen ADL dan IADL; 4. Terlaksananya pendampingan jangka panjang bagi lansia oleh keluarga anggota BKL yang memiliki lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang; 5. Terlaksananya pendampingan kepada lansia yang membutuhkan PJP yang tidak memiliki keluarga dan dirujuk kepada instansi atau mitra kerja terkait.
Frekuensi kegiatan	Minimal 1 kali dalam satu bulan

2. Melakukan pencatatan dan pelaporan sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia.

Tujuan	Terdokumentasikannya semua kegiatan yang dilaksanakan di kelompok BKL melalui pencatatan dan pelaporan K/O/BKL dan R/I/BKL di aplikasi New SIGA.
Bentuk kegiatan	- Melakukan pencatatan kegiatan sesuai dengan Pedoman BKL; - Melakukan pengisian form K/O/BKL dan R/I/BKL secara manual (formulir) maupun melakukan pelaporan langsung ke dalam aplikasi New SIGA; - Melaporkan form K/O/BKL dan R/I/BKL kepada PKB/PLKB pembina apabila masih manual (formulir).
Hasil yang diharapkan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di kelompok BKL

3. Strategi pelaksanaan di masa pandemi Covid-19
 - a. Melakukan pemetaan anggota kelompok BKL yang memiliki HP berbasis android dan bisa mengikuti pertemuan secara daring (*Virtual Meeting*, Media Sosial, Media Komunikasi Group, dll);
 - b. Melaksanakan penyuluhan rutin setiap bulan baik secara luring maupun daring;
 - c. Melakukan pelaporan K/0 dan R/1 setiap bulan di aplikasi New SIGA.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dilakukan secara berjenjang melalui Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan dalam Sistem Informasi Keluarga (New SIGA) berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan formulir:

- a. Formulir K/O/BKL/20 untuk pengisian Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL baru/Updating setiap awal tahun; dan
- b. Formulir R/I/BKL/20 untuk pengisian Register Kegiatan BKL setiap bulannya.

TUJUAN

1. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
2. Memperoleh rekapitulasi data jumlah BKL yang melakukan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi; dan
3. Memperoleh data pendukung (Data Basis BKL *by name by address*) dari tingkat desa sampai dengan provinsi.

MEKANISME PENGELOLAAN DATA

PUSAT

1. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN) :
 - a. Melakukan pemantauan kepada kelompok kegiatan BKL dalam pengisian formulir K/O dan register (R/I) melalui laporan New SIGA;
 - b. Melakukan pemantauan pelaporan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui aplikasi e-Monev Bappenas; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia berdasarkan hasil umpan balik dari aplikasi e-Monev Bappenas dan laporan New SIGA.
2. Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLPTIK) menyiapkan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang didalamnya termasuk pengelolaan

- data rutin BKL serta mendistribusikannya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi;
3. Direktorat Teknologi Informasi dan Data (DITTEKDA) bekerjasama dengan DITLAPTIK menyiapkan sistem aplikasi New SIGA dan kesiapan dukungan infrastruktur teknologi informasi (*Server, Bandwith, Network Security etc.*) untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengolahan data baik secara *online* maupun *offline*;
 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PUSDIKLAT) berkoordinasi dengan DITHANLAN, DITLAPTIK dan DITTEKDA dalam penyelenggaraan pelatihan atau orientasi kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dan Kepala Sub Bidang BKBAKKL di tingkat pusat dan provinsi;
 5. Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi New SIGA setiap bulan kepada DITHANLAN dan Perwakilan BKKBN provinsi.
 6. Biro Perencanaan (BIREN) membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi e-monev Bappenas setiap bulan kepada DITHANLAN.

PROVINSI

1. Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini Bidang ADPIN) mendistribusikan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang didalamnya termasuk pengelolaan data rutin BKL kepada OPD KB Kabupaten dan Kota;
2. Bidang ADPIN menyiapkan sarana dan sarana pengelolaan data berupa:
 - a. Formulir K/O/BKL/20 untuk pengisian/updating Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL; dan
 - b. Formulir R/I/BKL/20 untuk pengisian Register Kegiatan BKL.
3. Bidang ADPIN, Bidang KSPK dan Bidang LATBANG menyelenggarakan pelatihan, orientasi atau sosialisasi kepada Sub Bidang Data dan Informasi dan Sub Bidang BKBAKKL di tingkat kabupaten dan kota;
4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi:
 - a. Memastikan seluruh data K/O dan R/I terinput dalam aplikasi New SIGA oleh Kabupaten dan Kota;
 - b. Memfasilitasi unit pengelola data Kabupaten dan Kota jika ada *trouble shooting* dalam mengoperasikan aplikasi New SIGA;
 - c. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan

perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi New SIGA setiap bulan kepada Sub Koordinator Bidang BKBAKKL.

5. Kepala Sub Koordinator Perencanaan :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dan Kepala Sub Koordinator Bidang BKBAKKL untuk mendapatkan hasil capaian bulanan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk dilaporkan ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas;
- b. Mengisi capaian pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia setiap bulan ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas sesuai dengan data di New SIGA.

6. Kepala Sub Koordinator Bidang BKBAKKL :

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL;
- b. Melaksanakan pemantauan input K/O/BKL/20 dan R/I/BKL/20 BKL setiap bulan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi terkait laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi New SIGA setiap bulannya;
- d. Melakukan evaluasi kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia berdasarkan hasil umpan balik dari Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi Provinsi;
- e. Melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selambatnya **tanggal 25 setiap bulan** melalui email dithanlan@bkkbn.go.id. Laporan sedikitnya mencakup:
 - Perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
 - Data pelaksanaan sosialisasi penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia tingkat desa sampai dengan provinsi;
 - Data Basis BKL lokus penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia *by name by address*;
 - Data capaian target output bulan berjalan; dan
 - Laporan kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, pemecahan permasalahan dan pencapaian target pada bulan berjalan.

KABUPATEN/KOTA

1. Bidang yang menangani data dan informasi bekerjasama dengan Bidang KSPK melakukan pelatihan atau orientasi kepada PKB/PLKB dan atau Pengelola Poktan BKL;
2. Bidang yang menangani data dan informasi mendistribusikan sarana dan prasarana pengelolaan data rutin BKL kepada PKB/PLKB setiap kecamatan di wilayahnya.
 - a. Unit Pengelola Data:
 - Melakukan entri data K/O dan R/I ke dalam aplikasi New SIGA jika kecamatan atau Poktan tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/*Smartphone*/akses Internet);
 - Memfasilitasi kecamatan atau poktan yang melakukan input data mandiri jika ada *troubleshooting* dalam pengoperasian aplikasi New SIGA;
 - Membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi New SIGA setiap bulan kepada kecamatan dan poktan serta bidang pembangunan keluarga OPD KB kabupaten/kota.
 - b. Sub Koordinator Bidang BKBAKKL:
 - Mendorong dan memastikan Poktan BKL melakukan pelaporan K/O dan R/I dengan melibatkan PKB/PLKB sebagai pembina;
 - Memantau kegiatan Poktan BKL berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data;
 - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada bidang KSPK Provinsi selambatnya **tanggal 20 setiap bulan**. Laporan sedikitnya mencakup:
 - 1) Perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui Penguatan BKL dari tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota;
 - 2) Data pelaksanaan sosialisasi Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota;
 - 3) Data Basis BKL lokus Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia *by name by address*;
 - 4) Data capaian target output bulan berjalan; dan
 - 5) Laporan kendala/hambatan pencapaian target pada bulan berjalan.

KECAMATAN

- 1) Ka UPT/Koordinator PKB/PLKB melalui PKB/PLKB pembina poktan mendistribusikan formulir K/O dan R/I kepada Poktan BKL yang ada di wilayahnya;
- 2) Ka UPT/Koordinator PKB/PLKB melalui PKB/PLKB pembina poktan memberikan orientasi tata cara pengisian formulir K/O dan R/I kepada pengelola BKL baik secara luring (formulir) maupun secara daring (aplikasi);
- 3) Mendorong dan memastikan Poktan BKL melakukan pelaporan K/O dan R/I;
- 4) Pengelola data di Balai Penyuluhan melakukan entri data secara *online* atau *offline* jika POKTAN tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/*smartphone*/akses Internet); dan
- 5) Memantau kegiatan POKTAN BKL berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data Kabupaten/Kota.

KELOMPOK KEGIATAN BKL

- 1) Kelompok kegiatan BKL menerima formulir:
 - a. Formulir K/O/BKL/20 untuk pengisian/Updating Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL; dan
 - b. Formulir R/I/BKL/20 untuk pengisian Register Kegiatan BKL.
- 2) Pengelola/kader BKL melakukan pendaftaran menggunakan formulir K/O atau melakukan pendaftaran langsung di aplikasi New SIGA;
- 3) Pengelola/kader BKL melaporkan hasil kegiatan dengan menggunakan formulir R/I atau melakukan pelaporan langsung di aplikasi New SIGA;
- 4) Pengelola/kader BKL dapat melakukan input data K/O dan R/I secara *online* jika memiliki sarana dan prasarana (komputer/laptop/*smartphone* dan akses internet).
- 5) Penginputan data K/O dan R/I dapat dilakukan secara *online* oleh:
 - a. Pengelola BKL atau Kader BKL melalui aplikasi New SIGA. Jika sarana dan prasarana komputer/laptop/*smartphone* dan jaringan internet tidak memadai, maka data K/O dan R/I kelompok BKL dilaporkan ke PKB/PLKB sebagai pembina kelompok kegiatan BKL; atau
 - b. Pengelola data di Balai penyuluhan melalui aplikasi New SIGA.

PENGANGGARAN

PUSAT

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan tahun anggaran 2022.

PROVINSI

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB) diharapkan menyiapkan dukungan anggaran dan bersinergi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi. Pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang memerlukan dukungan anggaran di provinsi yang dapat dilihat dari Bab IV tentang Pelaksanaan.

Adapun sumber penganggaran kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia antara lain:

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
- Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi.
- Anggaran yang bersumber dari mitra kerja kelanjutusiaan tingkat provinsi.

KABUPATEN/KOTA

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB). Pelaksanaan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi

lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang memerlukan dukungan anggaran di kabupaten/kota dapat dilihat pada Bab IV tentang Pelaksanaan.

Untuk itu sumber dukungan anggaran pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kabupaten/kota antara lain :

- Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik (BOKB) Sub Bidang KB.
- Anggaran Dana Desa (ADD) yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes).
- Anggaran yang bersumber dari mitra kerja kelanjutusiaan lainnya.

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal tentang pelaksanaan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkatan wilayah.

PUSAT

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan kegiatan melalui laporan kegiatan provinsi dan/ atau kunjungan pembinaan; dan
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan regional.

PROVINSI

Bidang Keluarga Sejahtera Perwakilan BKKBN Provinsi bersama Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan BKL sebagai berikut:

1. Melaksanakan fasilitasi asistensi dan bimbingan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan kegiatan;
3. Menyusun jadwal pemantauan ke Kabupaten dan Kota; dan
4. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan setiap bulan.

KABUPATEN/KOTA

Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pemantauan ke Kecamatan;
2. Melaksanakan kunjungan lapangan; dan
3. Melaksanakan evaluasi laporan kegiatan.

4. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi.

KECAMATAN

UPT Kecamatan/Koordinator Lapangan melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan kegiatan di BKL sesuai dengan Rencana Pelaksanaan;
2. Melaksanakan kunjungan lapangan dan bimbingan teknis ke BKL; dan
3. Membuat laporan perkembangan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke OPD PP dan KB Kabupaten dan Kota setiap bulan.

PENUTUP

Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan Poktan BKL diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan lansia dan keluarga lansia dalam penerapan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP), sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat.

Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan acuan dan memudahkan pengelola program di tingkat wilayah dalam melaksanakan kegiatan “Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia”, sehingga pelaksanaan proyek ini dapat berjalan secara komprehensif, holistik, terintegrasi, dan sesuai dengan yang diharapkan.



Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2022